



**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN
TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1)

Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

Aliefka Hasnia Ihyaditama

4315500008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Aliefka Hasnia Ihyaditama, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawaban sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, Desember 2019



Aliefka Hasnia Ihyaditama

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

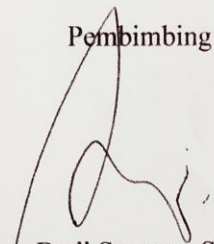
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA KOTA TEGAL

Aliefka Hasnia Ihyaditama

NPM 4315500008

Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I



Budi Susetyo, S.E., M.Si

NIPY. 124523111971

Tanggal : Desember 2019

Pembimbing II



Inayah Adi Sari, SE., M.Si., Akt

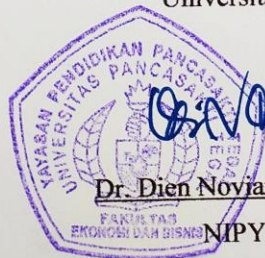
NIPY. 184523111978

Tanggal : Desember 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Dien Novriany R, S.E., M.M, Ak, CA.

NIPY. 136628111975

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi berjudul :

**Analisis Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran
dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.**

Yang diajukan oleh Aliefka Hasnia Ihyaditama, NPM : 4315500008 telah
dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 November 2019 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Disetujui Oleh

Ketua Penguji



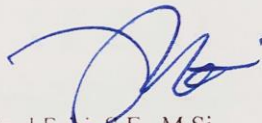
Sumarno, S.E., M.Si
NIPY. 8850811965

Anggota I



Inayah Adi Sari, S.E., M.Si., Akt
NIPY. 184523111978

Anggota II



Aminul Fajri, S.E., M.Si
NIPY. 1385231970

Mengetahui.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Novian R, S.E., M.M, Ak, CA.
NIPY. 136628111975

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan dunia. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, Akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku sayangi.

1. Untuk bapak dan ibuku tersayang, Moh. Hasyim dan Kurnia Dewi, terimakasih atas segala doa, dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak ibu bahagia. Aamiin.
2. Untuk adik-adikku, Bella Hasnia dan Taufiq Hasnia, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terimakasih atas doa selama ini, hanya karya sederhana ini yang dapat aku persembahkan.
3. Untuk terkasih, Aenun Anis, terimakasih atas perhatian, bantuan dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga tujuan kita sama-sama tercapai. Aamiin
4. Teman-teman akuntansi senasib, seperjuangan dan sepenanggungan. Terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari penuh cobaan menjadi lebih berarti dan berwarna.

Semoga tak ada lagi duka dan cerita keluh kesah, tetapi suka dan bahagia juga canda tawa aneh kalian. Aamiin.

Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Skripsi ini.

ABSTRAK

Aliefka Hasnia Ihyaditama. 2019. “Analisis Efektivitas Pembayaran Tunggal Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.”

Secara umum, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak setelah penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan yang terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Objek dalam penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan menggunakan surat paksa dan surat teguran dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, rasio efektivitas, rasio kontribusi serta analisis trend dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Tegal tergolong tidak efektif. Sedangkan untuk penilaian kontribusi menunjukkan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam kategori sangat kurang.

Kata Kunci : Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Aliefka Hasnia Ihyaditama, 2019. *"Analysis of the Effectiveness of Paying Tax Arrears with Warning Letters and Distress Warrant at the Tegal City Tax Service Office."*

In general, the purpose of this research is to find out the level of effectiveness and contribution of tax collection after the issuance of Warning Letters and Distress Warrant on income tax receipts that occurred from 2016 to 2018 in the Tegal Pratama Tax Office

The object of this research is the level of effectiveness of tax revenue by using Warning Letters and Distress Warrant in an effort to optimize tax revenue in Tegal Pratama Tax Office. This research method uses descriptive analysis, effectiveness ratio, contribution ratio and trend analysis with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that active tax collection with Warning Letters and Distress Warrant on the payment of tax arrears at Tegal Pratama Tax Office is not effective. Whereas the contribution assessment shows that active tax collection with Warning Letters and Distress Warrant at Tegal Pratama Tax Office is in the very poor category.

Keywords: *Effectiveness, Tax Collection ,Warning Letters, Distress Warrant, and Tax Receipts*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan proposal untuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal”**. Laporan Proposal Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Stara-1 di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal.

Selama penyusunan penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Dien Noviany R., SE, MM, Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Budi Susetyo, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, memberikan masukan, serta saran-saran dalam menyempurnakan proposal skripsi ini.
3. Ibu Inayah Adi Sari, S.E, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Pihak-pihak KPP Pratama Tegal yaitu Bapak Budi Gunawan selaku Kepala Kantor KPP Pratama Tegal, serta karyawan-karyawannya, yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu penulis dalam proses pengambilan data-data proposal skripsi.

5. Staf Tata Usaha Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal.
6. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material serta saudara-saudara terdekat.
7. Sahabat dan Orang terkasih yang senantiasa memberikan banyak dukungan dan semangat.

Tegal, 1 Oktober 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9

1. Teori Kepatuhan	9
B. Pajak	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Fungsi Pajak	13
3. Surat Ketetapan Pajak (SKP)	15
4. Surat Tagihan Pajak (STP)	16
5. Surat Teguran	17
6. Surat Paksa	18
7. Hambatan Pemungutan Pajak	19
C. Penagihan Pajak	21
1. Pengertian Penagihan Pajak	21
2. Dasar Penagihan Pajak	22
3. Tindakan Penagihan Pajak	23
4. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	24
5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	26
D. Daluarsa Penagihan	27
1. Jangka Waktu Penagihan	27
2. Tertangguhnya Daluarsa Penagihan	28
E. Efektivitas	28
F. Kontribusi Penelitian	29
G. Studi Penelitian Terdahulu	29
H. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Metode Analisis	33
B. Subjek Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum	39
1. Sejarah Singkat	39
2. Visi dan Misi KPP Pratama Tegal.....	40
3. Struktur Organisasi.....	41
4. Pembagian Tugas	43
B. Hasil Penelitian	46
1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Tegal.	47
2. Efektivitas Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak	49
3. Kontribusi Penagihan Pajak.....	53
4. Analisis Trend Kontribusi.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Surat Teguran Tahun 2016-2018	5
Tabel 2.1 Tindakan Penagihan Pajak	23
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	35
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	37
Tabel 4.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018	47
Tabel 4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018	48
Tabel 4.3 Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018	49
Tabel 4.4 Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018	51
Tabel 4.5 Perbandingan Realisasi Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018	53
Tabel 4.6 Perbandingan Realisasi Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir	32
Gambar 3.1 Trend Kontribusi Penerimaan Tunggalan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal	42
Gambar 4.2 Trend Kontribusi Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Teguran.....	57
Gamba4 4.3 Trend Kontribusi Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara disektor pajak dari waktu ke waktu kian menunjukkan peranan yang semakin dominan dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan pendistribusian pendapatan yang merata diseluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2015 sebesar Rp 1.240,41 triliun dan menjadi Rp 1.284,97 triliun pada tahun 2016. Penerimaan pajak ini menyumbang sekitar 97% dari total penerimaan dalam negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang target penerimaannya paling besar dalam APBN adalah pajak penghasilan. Data pokok BPS (Badan Pusat Statistik), mengenai Realisasi Penerimaan Negara tahun 2007-2018 dapat dilihat bahwa pajak penghasilan sebesar Rp 602,30 triliun pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp 657,16 triliun pada tahun 2016. Total dari penerimaan pajak penghasilan ini terus meningkat tiap tahun karena semakin tumbuhnya perekonomian dan besarnya potensi pajak yang bisa digali di Indonesia.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap

berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Definisi tersebut menunjukkan pentingnya membayar pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Walaupun demikian, terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa (Madjid, Kalangi : 2015). Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator salah satunya yakni masih banyaknya tunggakan pajak penghasilan yang belum atau tidak dilunasi oleh wajib pajak, dikarenakan wajib pajak masih kurang sadar akan pentingnya membayar pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan ketetapan pajak dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Paseleng, dkk : 2013). Tunggakan pajak seharusnya dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Namun dalam kenyataanya, masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar hutang pajaknya bahkan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Inilah salah satu faktor utama yang mengakibatkan tunggakan pajak terus

bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal tersebut DJP terus berupaya meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) atas Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) diberikan tanggung jawab oleh negara sebagai *law enforcement agent*, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. DJP merupakan institusi penting di negeri ini di mana mayoritas pembiayaan APBN berasal dari penerimaan pajak (Prinanggar Agus, 2018). Peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih seimbang antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak, dan kepentingan Negara.

Indonesia sering menghadapi hutang pajak yang belum dilunasi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak yang masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Fiskus telah melakukan berbagai tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara penagihan pajak pasif dan aktif. Penagihan pajak pasif adalah penagihan pajak yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan mengenai adanya utang pajak kepada Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu

satu bulan sejak diterbitkan Surat Tagihan atau pemberitahuan sejenisnya Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya maka pihak fiskus akan melakukan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif sendiri merupakan penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung pajak.

Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan maupun target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu aktivitas atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas dalam hal ini sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pihak pemotong pajak maupun pemungut pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal merupakan unsur pelaksana atau instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang selama ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya melalui kegiatan penagihan pajak pasif dan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa. KPP Pratama Tegal mempunyai perkembangan trend positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2016 sampai 2018. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Tegal menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran membayar pajak tepat waktu tergolong meningkat. Pada tahun 2016 tunggakan pajak sebesar Rp. 114.935.648.298,18 dan mengalami penurunan di tahun 2018 dengan tunggakan sebesar Rp. 38.524.060.504. Penelitian ini dimotivasi karena walaupun

terdapat trend positif dalam hal jumlah tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2016 sampai 2018, namun masih terdapat tunggakan tunggakan pajak yang sulit tertagih, dan tunggakan tersebut ditindak lanjuti karena pajak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa.

Penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum perpajakan, jika tindakan ini sudah terlaksana dengan benar maka akan meningkatkan pendapatan negara dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Berikut data penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2016 sampai 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Tabel 1.1

Surat Teguran Tahun 2016 – 2018

Tahun	Surat Teguran	
	Jumlah Nilai (Rp)	Realisai (Rp)
2016	12.2259.033.959,98	3. 829.011.706,00
2017	22.633.412.365,40	15.269.894.038,00
2018	7.264.955.935,00	3.422.305.240,00
Tahun	Surat Paksa	
	Jumlah Nilai (Rp)	Realisai (Rp)
2016	6.018.074.382,00	927.602.063,00
2017	5.772.786.332,62	3.123.627.818,48
2018	3.784.269.395,00	1.745.386.304,00

Sumber :KPP Pratama Tegal

Dilihat dari data yang telah dipaparkan, terdapat trend positif dalam tunggakan pajak di KPP Pratama Tegal tahun 2016-2018, akan tetapi jumlah realisasi dalam penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa masih tergolong minim. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas

penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Hal inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak di tegal tergolong efektif ?
2. Seberapa besar kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam realisasi tunggakan pajak ?
3. Bagaimana trend kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa dalam realisasi tunggakan pajak ?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal
2. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap realisasi tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

3. Untuk menganalisis trend yang terjadi terhadap kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya serta menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pembayaran tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai Penagihan Tunggakan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

b. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi atas penagihan tunggakan pajak.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu Penagihan Tunggalan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran maupun Surat Paksa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh dan taat pada ajaran maupun aturan yang berlaku. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Teori ini telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Saleh,(2004) terdapat dua sudut pandang dalam cakupan sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif

berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral atau nilai dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum dikarenakan hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP adalah dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa

Langkah ini diambil sebagai peringatan dan tindakan penagihan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Hal ini sesuai dengan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

B. Pajak

1. Pengertian Pajak.

Ada berbagai macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :

- a. Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
- b. Menurut Pandiangan (2015:10), pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut secara teratur serta dilindungi sebuah peraturan (Undang-undang) oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tersebut tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak.

Terdapat berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat*

timbang balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Pajak dari sudut pandang ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan pandangan bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang maupun jasa. Kedua, kemampuan keuangan Negara bertambah dalam hal penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat luas.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk berjalannya sistem pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini diketahui bahwa pajak yang dipungut harus berdasar undang-undang yang berlaku sehingga menjamin adanya sebuah kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak.

Namun dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dan pajak tersebut dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan yang bersifat memaksa guna mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Unsur – unsur yang terdapat dalam pajak adalah sebagai berikut:

- a. luran dari rakyat untuk Negara

Negara mempunyai hak untuk melaksanakan pungutan pajak dan pungutan pajak bukan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang.

- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Pemungutan pajak yang dilakukan tanpa adanya jasa timbal balik dari Negara secara langsung yang dapat ditunjukkan. Negara tidak akan menunjukkan timbal balik atas pajak yang selama ini sudah dibayar masyarakat secara individual.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara termasuk biaya operasional dalam pembangunan. Dengan ini pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara bagi APBN untuk membiayai tugas negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur penerimaan dalam APBN yang terdiri dari penerimaan negara dan hibah. Pos penerimaan negara atau penerimaan dalam negeri, sumbernya diperoleh dari: penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk,

Pajak Ekspor, dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, yang berarti ikut serta dalam proses kebijakan nasional dalam berbagai aspek kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah. Misalnya untuk mendorong kegiatan ekspor, diberikan kemudahan dan keringanan pajak, sehingga mendorong dunia usaha melakukan ekspor.

Dari definisi diatas, Pohan (2014:33-36), menyatakan bahwa fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak karena secara historis fungsi ini adalah fungsi yang pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah melakukan pemungutan dana dari penduduknya untuk pembiayaan berbagai macam kepentingan negara.

Sedangkan, fungsi *regulerend* merupakan fungsi tambahan/pelengkap karena sifatnya hanya melengkapi fungsi utama pajak yaitu fungsi pendanaan sebagai sarana untuk penambah kas dan penerimaan negara. Dalam fungsi *regulerend*, pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai sarana kebijaksanaan bagi Pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.

3. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) sendiri merupakan surat dari hasil proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pajak atau sebagai hasil dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ditujukan kepada Wajib Pajak dikarenakan adanya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak atau ditemukannya ketidak benaran dalam pengisian surat Ketetapan Pajak. Surat tersebut mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Sarana untuk melakukan koreksi atas jumlah pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tertentu dan memberitahukan jumlah pajak yang terutang
- b. Sarana untuk mengembalikan kelebihan bayar pajak
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak dan mengenakan sanksi administrasi perpajakan

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP). Surat Ketetapan Pajak dibedakan menjadi SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Adapun jangka waktu dan penyebab diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah sebagai berikut:

- a. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)

DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun apabila setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak ditemukannya hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak/kurang

dibayar atau bisa juga wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara.

b. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

Diterbitkan DJP apabila ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT

c. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)

Dilakukan setelah pemeriksaan dalam jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, bias juga diterbitkan apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

d. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)

Penerbitan SKPN dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dalam jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.

4. Surat Tagihan Pajak (STP)

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Dalam tingkatannya Surat Tagihan

Pajak dan Surat Ketetapan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga dalam hal penagihannya juga dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Surat Tegihan Pajak diterbitkan apabila :

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, salah tulis atau dalah hitung
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- c. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan tidak mengisi faktur secara lengkap,
- d. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
- e. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

5. Surat Teguran

Surat Teguran diterbitkan jika terdapat utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak dilunasi sampai batas waktu terbilang 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

Langkah ini dilakukan sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran tidak perlu diterbitkan apabila Penanggung Pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan

dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

Penyampaian Surat Teguran tidak harus dilakukan langsung oleh Jurusita Pajak, namun dapat dilakukan dengan dikirimkannya surat tersebut melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

6. Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak beserta biaya penyampaian surat tersebut. Kepala surat di dalam Surat paksa bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan. Hal tersebut berarti bahwa surat paksa memiliki kekuatan dan kedudukan hukum yang setara dengan Putusan Pengadilan. Surat tersebut masih bisa ditentang atau digugat apabila tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tidak diberitahukan menurut cara yang sudah ditentukan dan jika surat tersebut tidak diberitahukan secara resmi.

Surat ini disampaikan langsung di hadapan penanggung pajak tetapi berupa salinan, sedangkan yang asli disimpan di kantor pejabat. Surat paksa setidaknya meliputi :

- a. Nama Wajib pajak dan Penanggung Pajak
- b. Besarnya Utang Pajak yang harus dibayarkan
- c. Dasar penagihan
- d. Perintah untuk membayar.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Sebagian besar orang dalam dunia usaha, pajak sendiri merupakan sebuah beban yang akan mengurahi pendapatan mereka. Perlawanan dan penghindaran terhadap pemungutan pajak merupakan hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Menurut Waluyo (2014:12), terdapat 2 bentuk perlawanan terhadap pajak yaitu :

a. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini dilakukan guna menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar. Bentuk perlawanan aktif ada 2 macam, yaitu:

1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak ini, pelaku atau wajib pajak secara samar samar dalam melanggar undang undang terkadang dengan jelas menafsirkan undang undang tidak sesuai dengan tujuan apa dibuatnya undang undang tersebut. Penghindaran ini terjadi sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

2) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Ini merupakan tindak pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud membebaskan diri dari pajak atau bias juga dengan mengurangi penetapan pajak, cara yang dilakukan adalah menyembunyikan sebagian

penghasilannya maupun memperbesar biaya dengan cara fiktif

b. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif merupakan sebuah perlawanan yang mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi dan berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Dari definisi tersebut, Pohan (2014:75-76), mengungkapkan bahwa perlawanan pasif yang dilakukan masyarakat bisa saja seperti sikap masyarakat yang tidak pasif karena mereka enggan untuk membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal seperti, faktor intelektual dan moral masyarakat yang berkembang, sistem perpajakan yang sulit mereka pahami, dan sistem pengawasan fiskus/pemerintah yang tidak dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:8) Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa perlawanan pasif sendiri merupakan perlawanan yang inisiatifnya bukan dari

wajib pajak itu sendiri, melainkan terjadi karena beberapa faktor keadaan yang ada di sekitar wajib pajak tersebut. Hambatan-hambatan tersebut bias berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

C. Penagihan Pajak

Pemerintah sangat mengharapkan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai adanya sebuah tunggakan pajak dikarenakan oleh kelalaian Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Jumlah tunggakan pajak yang tidak seimbang dengan pencairan pajak merupakan suatu bukti nyata. Perkembangan tunggakan yang semakin hari semakin besar dan sulit untuk dikontrol perlu dilaksanakannya suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa

1. Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:145), penagihan pajak ialah: Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, maupun menjual barang yang telah disita.

2. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak merupakan sebuah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga maupun berupa denda.

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

c. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak.

d. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan, sebuah surat yang berisi keberatan terhadap surat ketetapan pajak, terhadap pemotongan maupun terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak sendiri.

e. Putusan Banding

Putusan Banding merupakan putusan badan peradilan pajak atas banding kepada Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

3. Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010;80) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tindakan Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar Hukum
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2.	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran / surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008
3.	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4.	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

		pajak	
5.	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomer 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomer 24/PMK.03.2008

Sumber : Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:80)

4. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

a. Pengertian Surat Teguran

Pemberitahuan Surat Teguran adalah prosedur awal dari serangkaian tindakan penagihan pajak. Definisi Surat Teguran itu sendiri merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat kepada Wajib Pajak untuk menegur dan memberikan peringatan supaya Wajib Pajak melunasi utang pajaknya (Pohan, 2014).

b. Pelaksanaan Surat Teguran

Adapun menurut Ilyas dan Suhartono (2013), Surat Teguran diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan penerbitannya hanya sebanyak satu kali. Penerbitan Surat Teguran merupakan prosedur awal dari serangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada Penanggung Pajak yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yaitu melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

c. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan surat teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya

utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

- 1) STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
- 2) Bagi wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak didaerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- 3) Surat Tagihan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
- 4) SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT. Jangka waktu pelunasan pajak yang tidak

disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- 6) Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2011:147), Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang memiliki 40 kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan perdata atau *grosse akte* yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga Surat Paksa dapat langsung dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan serta tidak dapat diajukan banding.

b. Penerbitan Surat Paksa

Menurut Pasal 8 Ayat 1 Undang- Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa diterbitkan jika :

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

c. Sifat Surat Paksa

- 1) Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata.
- 2) Berkekuatan hukum pasti (*in kracht van Gewijsde*)
- 3) Memiliki fungsi ganda yaitu sebagai sarana menagih pajak dan bukan pajak seperti biaya-biaya penagihan.

D. Daluwarsa Penagihan

Adanya kedaluwarsa penagihan adalah untuk menegaskan adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak terhadap suatu utang pajak untuk tidak ada penagihan kembali (Ilyas, 2007:136).

1. Jangka Waktu Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa apabila setelah melewati jangka waktu 5 tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan, banding, pembetulan atau peninjauan ulang, daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

2. Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan

Sesuai dengan Undang-Undang no. 28 tahun 2007 Pasal 22 mengenai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, daluwarsa penagihan pajak akan tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Paksa
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Dilakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak akan menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut

E. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (seperti dikutip oleh Tunas, 2013), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Menurut definisi diatas, bisa diartikan bahwa efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai target maupun tujuan tersebut, efektivitas hanya menilai apakah suatu kegiatan maupun program yang dijalankan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

F. Kontribusi

Apabila dikaitkan dengan tindakan penagihan pajak, kontribusi dimaksudkan sebagai sumbangan yang diberikan dari suatu tindakan penagihan pajak yang dilakukan dalam bentuk pencairan tunggakan pajak atau penerimaan pajak.

G. Studi Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini ditujukan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
Paseleng, Poputra, dan Tangkuman (2013)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak penghasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Manado tergolong tidak efektif dengan persentase <60% 2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan tergolong sangat kurang dikisaran 0,00% - 10%
Nalle (2017)	Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penagihan pajak melalui surat teguran di KPP Sindangraja tahun 2010-2014 didapati tidak efektif 2. Penagihan pajak melalui surat paksa di KPP Sindangraja tahun 2010-2014 tidak efektif

Kurniasari, Suharyono dan Kesuma (2016)	Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama di Balikpapan	1. Penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa di KPP Balikpapan tahun 2012-2015 tergolong cukup efektif yaitu diatas 80% Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Balikpapan tergolong kriteria kontribusi yang sangat kurang
Majdid, dan Kalangi (2015)	Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan	1. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran tahun 2013-2014 dan surat paksa tahun 2013 di KPP Bitung tergolong kurang efektif, sedangkan penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa tahun 2014 tergolong efektif 2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Bitung tergolong sangat kurang
Velayati, Husaini, dan Handayani (2013)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Panagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak	1. Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di KPP Batu dari tahun 2010-2012 tergolong tidak efektif 2. Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di tahun 2010 dan 2012 tergolong tidak efektif sedangkan 2011tergolong efektif 3. Penagihan pajak aktif mempunyai tingkat kontribusi dengan

		presentase kurang dari 10%
--	--	----------------------------

H. Kerangka Berpikir

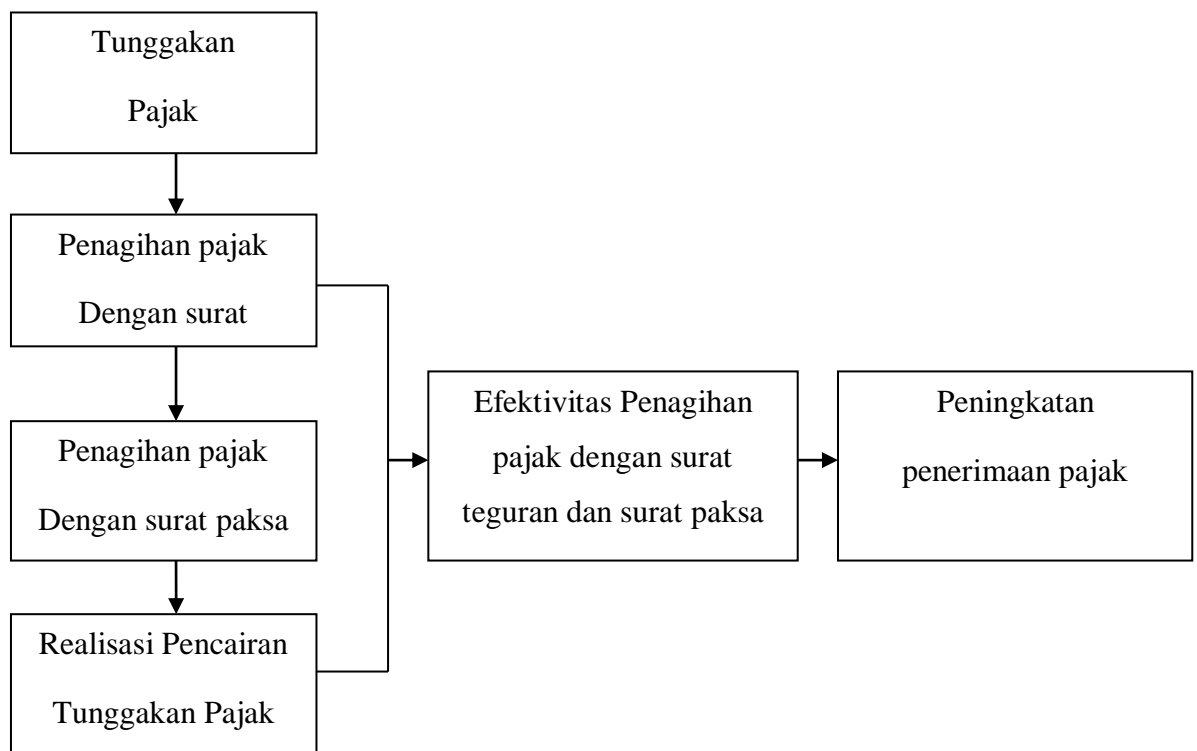
Salah satu contoh tindakan penagihan pajak adalah dengan menerbitkan pemberitahuan, berupa surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif (Erwis, 2014).

Penulis dalam penelitian ini berusaha untuk meneliti seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal selama tahun 2016 – 2018. Dengan mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan tunggakan pajak, maka diharapkan dapat diberlakukan tindakan tindakan yang sesuai sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan tunggakan pajak dari tahun ke tahun yang tentunya dapat menghambat pembangunan nasional.

Dalam penelitian Paseleng, Poputra, dan Tangkuman, 2013; Velayati, Husaini, dan Handayani, 2013; Kurniasari, Suharyono, dan Kesuma, 2016; Majdid, dan Kalangi, 2015 penagihan pajak menggunakan surat Teguran dan Surat Paksa tergolong kurang efektif. Sebaliknya menurut Nalle, 2017 Penagihan

Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong cukup efektif.

Dari keterangan diatas dan penelitian terdahulu, maka penulis dapat membuat model kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Analisis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pajak Pratama Kota Tegal Jl. Kolonel Sugiono No.5, Pekauman, Tegal Barat., Kota Tegal, Jawa Tengah 52113. Objek dalam penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan menggunakan surat paksa dan surat teguran pada KPP Pratama Tegal dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan akurat maka peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah bentuk pengambilan data dengan membaca literature dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

a. Metode Observasi atau Pengamatan

1) Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Tegal

2) Membandingkan fakta – fakta yang ada di lapangan dengan teori

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Tegal

c. Interview dan Wawancara

Penulis mengumpulkan data yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Tegal dan jurusita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a. Rasio Efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama)

Indikator yang digunakan untuk mengukur keefektifan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber ; Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Velayati: 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% maka bias dikatakan hasil tersebut tidak efektif.

- b. Rasio kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RTPP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

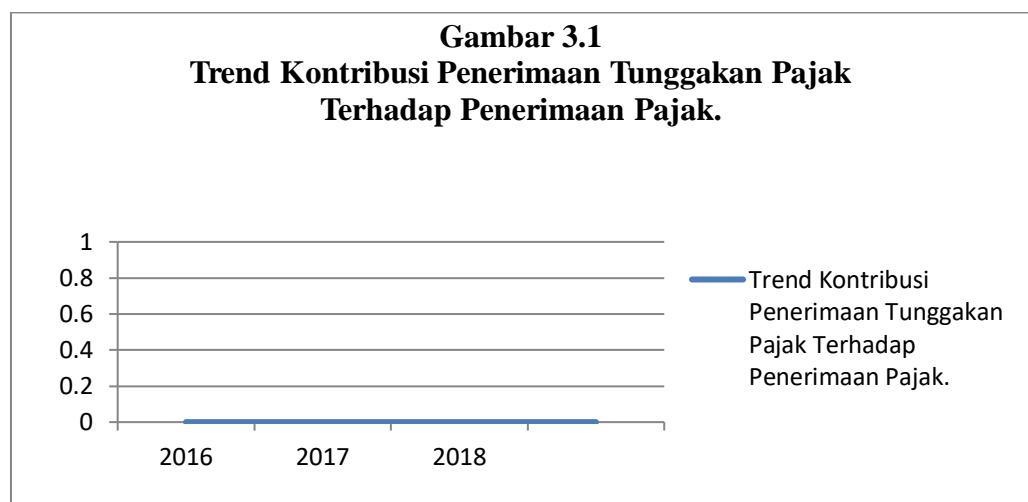
Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel 3.2 menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

c. Analisis Trend

Salah satu bentuk analisis trend dalam penelitian ini berupa kegiatan menyimpulkan data dalam jumlah besar , berupa data hasil olahan kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak, sehingga hasilnya dapat ditafsirkan dalam bentuk grafik



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat.

Bertepatan di bulan Juni tahun 1964 pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang di resmikan oleh DPJ Drs. Soejono Brotodiharjo. Dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan, meliputi wilayah Karesidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara untuk Kota Madya Tegal pada saat itu belum terbentuk.

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk menggali potensi pajak terus digalakkan seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah Kabupaten Tegal baik pada saat itu hingga sekarang, maka Dirjen Pajak mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal.

Tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai ketetapan Dirjen Pajak, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan

inspeksi atau pemeriksaan semata, tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat luas terutama wajib pajak.

Kemudian nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Direktorat Jenderal Pajak”, dengan Kepala Kantor sebagai berikut:

- a. Drs. Moh. I. Budhy Triwindhu
- b. Drs. Suwarno, MBA
- c. Adilega Tanius
- d. Jhony Victor
- e. Budi Gunawan

KPP Tegal sejak masih berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Soetomo, hingga saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No. 5 Kotamadya Tegal.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Tegal.

Visi dari KPP Pratama Tegal adalah “ Menjadi Institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara “.

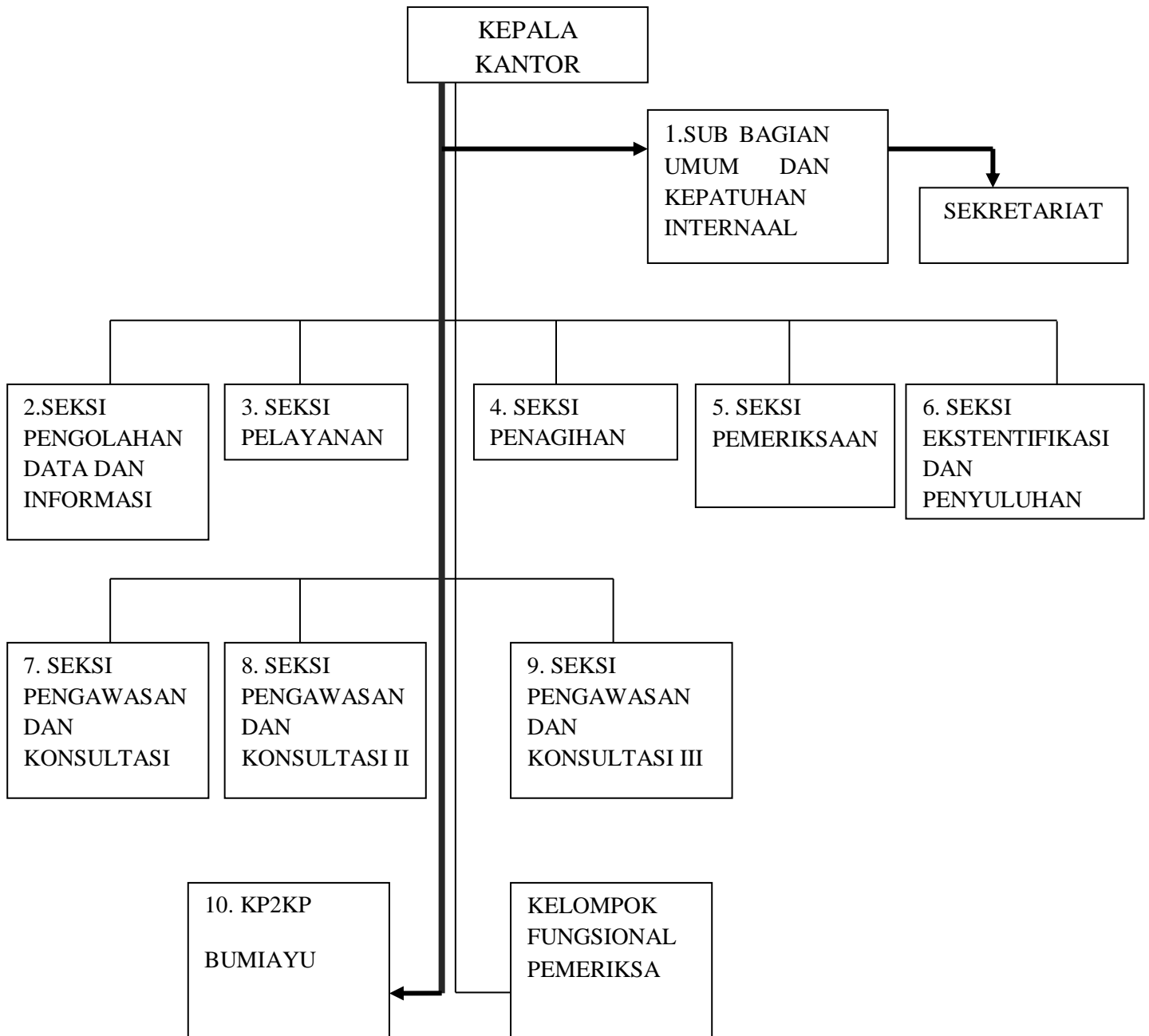
Adapun misi dari KPP Pratama Tegal adalah,

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam sebuah usaha untuk mencapai tujuan dan target yang telah disepakati. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang Gjabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut gambaran struktur organisasi KPP Pratama Tegal:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

4. Pembagian tugas

Berdasarkan Gambar 4.1, berikut ini akan diuraikan tugas dari setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal,

a. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

c. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data. pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan berupa perekaman dokumen perpajakan, sekaligus urusan tata usaha penerimaan perpajakan. pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing. pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

e. Seksi Pelayanan.

Bertugas melakukan pengadministrasian dokumen berupa berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, maupun surat terkait lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak

f. Seksi Penagihan.

Mempunyai tugas melakukan urusan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. usulan penghapusan piutang pajak, dan penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

g. Pemeriksaan.

Bertugas menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

h. Ekstentifikasi dan Penyuluhan.

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

Bertugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan Seksi Pengawasan Konsultasi III.

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seperti menyusun profil Wajib Pajak. menganalisis kinerja Wajib Pajak, me rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka mengindensifikasi Wajib Pajak.

k. KP2P Bumiayu.

Tugas utama KP2KP Bumiayu adalah membantu KPP Pratama Tegal untuk memberikan Pelayanan Perpajakan kepada masyarakat Kabupaten Brebes. Pelayanan yang diberikan oleh KP2KP Bumiayu adalah : menerima pelaporan dan permohonan

Wajib Pajak, memberikan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, ditambah beberapa layanan tambahan lain di bidang perpajakan.

1. Kelompok Fungsional Pemeriksa

Memeriksa serangkaian kegiatan mengolah data, berupa keterangan ataupun bukti yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, dengan tujuan terlaksananya ketentuan perundang-undangan perpajakan.

B. Hasil Penelitian.

Analisis yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berupa rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas pembayaran tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Dengan menggunakan metode ini penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi beserta trend penerbitan surat teguran maupun surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah untuk mengetahui persentase dari realisasi penerbitannya. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan surat teguran serta pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Dalam bab ini penulis membahas lebih jauh tentang Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak di tahun 2016 sampai 2018.

1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Tegal.

- a. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Berikut data Penagihan Pajak dengan Surat Teguran beserta Realisasi Pencairan Surat Teguran di KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018 :

Tabel 4.1
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Tegal Tahun 2016 - 2018

Tahun	Surat Teguran Terbit (Rupiah)	Realisasi Pencairan Surat Teguran (Rupiah)
2016	Rp. 12. 259.033.959	Rp. 3.829.011.706
2017	Rp. 22.633.412.365	Rp. 15.269.894.038
2018	Rp. 7.264.955.935	Rp. 3.422.305.240

Sumber: Data KPP Pratama Tegal.

b. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Paksa merupakan tindak lanjut dari Surat Teguran, diterbitkan apabila penagihan yang sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.

Berikut data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta Realisasi Pencairan Surat Paksa di KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018 :

Tabel 4.2
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Tegal Tahun 2016 – 2018

Tahun	Surat Paksa Terbit (Rupiah)	Realisasi Pencairan Surat Paksa (Rupiah)
2016	Rp. 6.018.074.382	Rp. 927.602.063
2017	Rp. 5.772.786.332	Rp. 3.123.627.818
2018	Rp. 3.784.269.395	Rp. 1.745.386.304

Sumber: Data KPP Pratama Tegal.

2. Efektivitas Terhadap Pembayaran Tunggalan Pajak

a. Efektivitas Pembayaran Tunggalan Pajak dengan Surat Teguran

Efektivitas penagihan tunggalan pajak dengan surat teguran menggunakan rumus perbandingan antara jumlah realisasi pencairan tunggalan pajak menggunakan surat teguran dengan jumlah penerbitan surat tersebut. Efektivitas penerbitan surat teguran dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama)

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan seberapa efektif penerbitan Surat Teguran.

Tabel 4.3
Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran
Pada KPP Pratama Tegal Tahun 2016 – 2018

Tahun	Surat Teguran Terbit (Rupiah)	Surat Teguran Dibayar (Rupiah)	Tingkat Efektivitas
2016	Rp. 12.259.033.959	Rp. 3.829.011.706	31,2%
2017	Rp. 22.633.412.365	Rp. 15.269.894.038	67,4%
2018	Rp. 7.264.955.935	Rp. 3.422.305.240	47,1%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Tegal, Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.3, penagihan pajak dengan Surat ditahun 2016 sebesar Rp. 12.259.033.959 mengalami kenaikan penggunaan Surat Teguran di tahun berikutnya menjadi Rp 22.633.412.365 akan tetapi ditahun 2018 mengalami penurunan penerbitan surat teguran yang sangat drastis sebesar Rp. 7.264.955.935.

Untuk realisasi pembayaran tunggakan pajak menggunakan Surat Teguran di tahun 2016 sejumlah Rp. 3.829.001.706 mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi Rp 15.269.894.038, kemudian realisasi kembali turun drastis senilai Rp. 3.422.305.240.

Penggunaan atau Penerbitan Surat Teguran tahun 2016-2018 cukup fluktuatif dan berdasarkan indikator pada Tabel 3.1 bisa dikatakan penggunaannya tergolong Tidak Efektif. Hal ini dikarenakan Tingkat efektivitas di tahun 2016 hanya sebesar 31,2%, tahun 2017 sejumlah 67,4% dan tahun berikutnya sejumlah 47,1%.

Masih banyaknya penerbitan surat teguran juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis Tidak Efektif. Berikut beberapa faktor penyebabnya, penanggung pajak lalai akan

kewajibannya, tidak sedikit Wajib Pajak yang lupa akan utang pajaknya dikarenakan kesadaran Wajib Pajak masih kurang dalam membayar tagihan pajak tepat waktu.

Wajib Pajak masih belum mampu untuk melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo, karena kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus. Terjadi perubahan data alamat sehingga Surat teguran yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak tersampaikan.

b. Efektivitas Pembayaran Tunggal Pajak dengan Surat Paksa.

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa menggunakan rumus perbandingan antara jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak menggunakan surat paksa dengan jumlah penerbitan surat tersebut. Efektivitas penerbitan surat teguran dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama)

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa :

Tabel 4.4
Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
Pada KPP Pratama Tegal Tahun 2016 – 2018

Tahun	Surat Paksa Terbit (Rupiah)	Surat Paksa Dibayar (Rupiah)	Tingkat Efektivitas
2016	Rp. 6.018.074.382	Rp. 927.602.063	15,4%
2017	Rp. 5.772.786.332	Rp. 3.123.627.818	54,1%
2018	Rp. 3.784.269.395	Rp. 1.745.386.304	46,1%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Tegal, Data diolah, 2019

Sesuai dengan Tabel 4.4, penerbitan Surat Paksa cukup baik dikarenakan penggunaannya kian menurun. Pada tahun 2016 penerbitan surat paksa di KPP Pratama Tegal sebesar Rp. 6.018.074.382, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.772.786.332, tahun 2018 kembali menurun dengan penerbitan sejumlah Rp. 3.784.269.395.

Realisasi pembayaran tunggakan pajak dengan Surat Paksa selama tiga tahun tergolong fluktuatif di tahun 2016 sejumlah Rp. 927.602.063 mengalami kenaikan di tahun berikutnya menjadi Rp. 3.123.627.818 dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1.745.386.304.

Berdasarkan Tabel 3.1 Tingkat Efektivitas Penggunaan Surat Paksa di KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2018 tergolong Tidak Efektif. Hal ini disebabkan oleh tingkat efektifitas tertinggi hanya mencapai 54,1% (Tidak Efektif) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Hal tersebut sangat miris dikarenakann walaupun terdapat penurunan jumlah nominal dalam penerbitan, akan tetapi menurut Juru Sita setempat hal ini masih tergolong memprihatinkan karena jumlah realisasi pencairan masih tergolong minim.

. Beberapa hal yang menyebabkan penerbitan surat paksa tidak efektif antara lain,

- 1) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya
- 2) Penanggung pajak tidak mengakui akan utang pajaknya
- 3) Penanggung pajak tidak mampu untuk melunasi hutang pajaknya
- 4) Banyak penanggung pajak yang mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajak
- 5) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika utang pajaknya dibayar sekaligus.

3. Kontribusi Penangihan Pajak.

a. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Realisasi Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tegal.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Rumus untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut :

$$RTPP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama)

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak menggunakan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal akan disajikan pada Tabel 4.5. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar realisasi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 4.5
Perbandingan Realisasi Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tegal Tahun 2016 - 2018

Tahun	Realisasi Pencairan Surat Teguran (Rupiah)	Penerimaan Pajak (Rupiah)	Tingkat Kontribusi
2016	Rp. 3.829.011.706	Rp. 951.512.141.973	0,40%
2017	Rp. 15.269.894.038	Rp. 848.198.050.769	1,80%
2018	Rp. 3.422.305.240	Rp. 857.221.086.418	0.39%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Tegal, Data diolah, 2019

Berdasarkan table 4.5, dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat teguran di KPP Pratama tegal tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.829.011.706. Jika realisasi pencairan tersebut dibandingkan dengan total penerimaan pajak pada tahun yang sama sebesar Rp 951.512.141.973, maka dapat dihitung nilai kontribusinya mencapai 0,40%. Menurut Tabel Klasifikasi Kontribusi, nilai kontribusi sebesar 0.40% dapat dikategorikan kedalam kategori Sangat Kurang (Tabel 3.2 : Hal 37)

Pada Tahun 2017, niali kontribusi penagihan tunggakan pajak mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,80%. Nilai ini didapat atas perbandingan realisasi pencairan pajak dengan surat teguran sebesar Rp. 15.269.894.038 dengan total penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal yang mengalami penurunan sebesar Rp. 848.198.050.769.

Meskipun mengalami peningkatan kontribusi, menurut Tabel Klasifikasi Kontribusi nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak tahun 2017 masih tergolong kategori Sangat Kurang.

Ditahun berikutnya total penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal sebesar Rp. 857.221.086.418 dengan jumlah pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkan surat teguran adalah hanya sebesar Rp. 3.422.305.240. Tingkat kontribusi di tahun 2018 merupakan yang terendah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, di tahun 2018 tingkat kontribusi sebesar 0.39%. Nilai ini tergolong dalam kategori Sangat Kurang.

Walaupun nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan penerbitan surat teguran termasuk dalam kategori Sangat Kurang, tapi hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak mengalami peningkatan yang baik di tahun 2017 karena dapat dilihat dari jumlah realisasi tunggakan pajak dengan penerbitan surat teguran yang sangat tinggi di tahun tersebut.

b. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Realisasi Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tegal.

Untuk mengukur seberapa besar penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah di KPP Formula untuk Rasio Penerimaan

Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

$$RTPP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama)

Kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP tegal dapat dilihat pada table 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6
Perbandingan Realisasi Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tegal Tahun 2016 - 2018

Tahun	Realisasi Pencairan Surat Paksa (Rupiah)	Penerimaan Pajak (Rupiah)	Tingkat Kontribusi
2016	Rp. 927.602.063	Rp. 951.512.141.973	0,09%
2017	Rp. 3.123.627.818	Rp. 848.198.050.769	0,36%
2018	Rp. 1.745.386.304	Rp. 857.221.086.418	0,20%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Tegal, Data diolah, 2019

Berdasar tabel 4.6, dapat diketahui bahwa realisasi pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat paksa di KPP Pratama tegal pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 927.602.063. jika apencairan tersebut dibandingkan dengan total penerimaan pajak pada tahun yang sama sebesar Rp. 951.512.141.973, maka dapat dihitung nilai kontribusinya mencapai 0,09%. Nilai kontribusi ini dapat dikategorikan kedalam kategori Sangat Kurang (Tabel 3.2 : Hal 37)

Pada tahun berikutnya, nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu

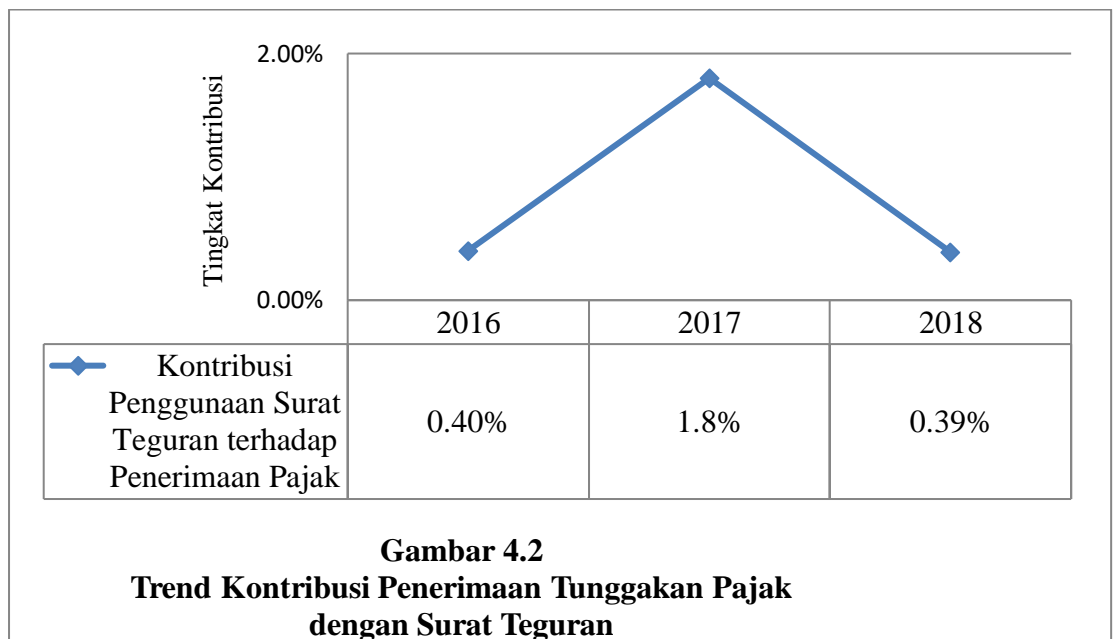
sebesar 0,36%. Nilai ini didapat atas perbandingan realisasi pencairan tunggakan pajak menggunakan Surat Paksa sebesar Rp. 3.123.627.818 dengan total penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal yang saat itu mengalami penurunan sebesar Rp. 848.198.050.769. Namun di tahun 2017 ini nilai kontribusi penagihan tunggakan pajak tahun ini masih termasuk kategori Sangat Kurang.

Tahun 2018 total penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal sebesar Rp. 857.221.086.418 dengan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkan surat paksa adalah hanya sebesar Rp. 1.745.386.304. Walaupun terjadi peningkatan dalam hal penerimaan pajak selama tahun 2017-2018, akan tetapi nilai kontribusi setelah dihitung adalah sebesar 0,20%. Nilai ini tergolong dalam kategori Sangat Kurang.

4. Analisis Trend Kontribusi.

a. Trend Kontribusi Penggunaan Surat Teguran

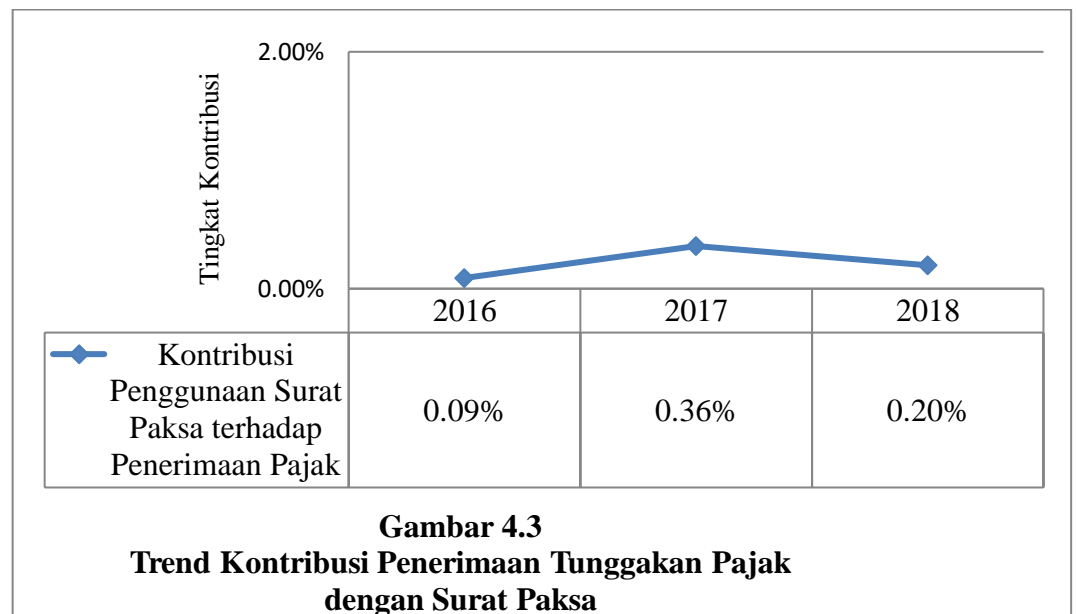
Analisis trend kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini



Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa trend kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran bias dikatakan cukup fluktuatif. Tahun 2016 Surat Teguran menyumbang kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 0,40%. Tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1,8%. Tahun 2018 Penggunaan Surat Teguran kembali mengalami penurunan menjadi 0,39%. Bisa diartikan dalam tiga tahun terakhir Surat Teguran menyumbang kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal sebesar 0,86%. Bisa diasumsikan penyebabnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak di Tegal.

b. Trend Kontribusi Penggunaan Surat Paksa

Hasil analisis trend kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut,



Gambar 4.3 menunjukkan trend yang fluktuatif, terlihat dari tahun 2016 Surat Paksa mempunyai kontribusi sebesar 0,09% terhadap penerimaan pajak, di tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 0,36%. Sedangkan di tahun 2018 kembali mengalami penurunan kontribusi menjadi 0,20%. Surat Paksa mempunyai kontribusi yang cukup kecil dibandingkan dengan kontribusi Surat Teguran dan bisa diartikan Surat Paksa mempunyai kontribusi lebih sedikit dibanding penggunaan surat teguran. sebesar 0,21 %.

C. Pembahasan

Pembayaran pajak dari penerbitan Surat Teguran ataupun Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dari tahun 2016-2018 masih tergolong kriteria yang Tidak Efektif. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun tingkat efektivitas pembayaran pajak berada dalam kriteria efektif yaitu diatas

60%. Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di tahun 2016-2018 tergolong dalam kriteria kontribusi yang Sangat Kurang terhadap penerimaan tunggakan pajak, karena pada tahun 2016-2018 kontribusi penerimaan tunggakan pajak dikisaran 0,00% - 10%.

Pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran ataupun Surat Paksa belum bisa tercapai sepenuhnya dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Tegal di Seksi Penagihan, sementara ditemui adanya Penanggung Pajak yang cukup banyak sehingga tidak dapat mencukupi untuk melakukan pelaksanaan surat paksa dalam waktu yang ditentukan.

Selain adanya kesulitan pencarian terhadap Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tersebut pindah alamat atau tempat usaha tanpa memberikan keterangan terhadap pihak KPP Pratama Tegal sehingga juru sita kesulitan mencari objek sita, rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta banyaknya Wajib Pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri, sehingga sangat menghambat proses pembayaran tunggakan pajak.

Adapun dalam pembahasan kali ini penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paseleng (2013), Velayati (2013) dan Nalle (2017) yang menunjukkan tingkat efektivitas dan kontribusi dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang pada umumnya Kurang Efektif dan Sangat Kurang. Akan

tetapi penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2016) dan Majdid (2015) yang menunjukkan hasil tingkat efektivitas yang Efektif dengan tingkat kontribusi yang Sangat Kurang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan mengolah data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dari tahun 2016-2018 cukup fluktuatif, sempat mencapai titik tertinggi di tahun 2017 sebesar 67,4% (Kurang Efektif) dengan tahun sebelumnya sebesar 31,2% (Tidak Efektif), namun ditahun 2018 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 47,1% (Tidak Efektif). Penagihan pajak aktif menggunakan Surat Paksa mengalami hal yang sama, di tahun 2016 - 2018 mengalami fluktuasi yang cukup tajam dimana di tahun 2016 efektivitas berkisar 15,4% kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan yang drastis menjadi 54,1%, lalu di tahun 2018 tingkat efektivitas anjlok hanya sebesar 46,1%. Selama tiga tahun terakhir tergolong Tidak Efektif.
2. Dalam hal ini kontribusi berupa tindakan yang berarti sumbangan atau masukan Surat teguran dan Surat Paksa untuk pembayaran tunggakan pajak. Kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pembayaran tunggakan pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal di tahun 2016-2018 tergolong dalam kriteria Sangat Kurang. Kontribusi pembayaran tunggakan pajak dengan Surat Teguran tertinggi

hanya sebesar 1,80%, sedangkan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa tertinggi hanya 0,36%.

3. Trend kontribusi penggunaan Surat Teguran bisa dikatakan cukup fluktuatif, demikian dengan penggunaan Surat Paksa guna meningkatkan pembayaran tunggakan pajak. Dalam kurun waktu 2016-2018 Surat Teguran memberi kontribusi sebesar 2,59% bias dikatakan per tahun sekitar 0,83% sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan Surat Paksa sebesar 0,65% dengan rata rata 0,21% per tahun..

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. KPP Pratama Tegal untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat
2. Perlu adanya strategi-strategi yang jitu dari manajemen KPP Pratama Tegal untuk lebih masuk ranah masyarakat dalam rangka sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah, kelurahan dan tempat lainnya atau dengan cara membuat pengumuman di media cetak maupun media elektronik, bisa juga melakukan siaran di radio atau iklan di tv.
3. Melakukan pengecekan secara periodic mengenai data identitas dan alamat Wajib Pajak sehingga meminimalisir terjadinya perubahan data Wajib Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.

4. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi penagihan pajak dengan surat paksa, dan mengupayakan para petugas bagian penagihan untuk bekerja lebih keras lagi, dengan begitu penerimaan pajak akan semakin meningkat dan pendapatan Negara akan bertambah.
5. Selain mengirimkan Surat teguran, diharapkan pihak KPP Pratama tegal melakukan peringatan berupa pesan singkat (SMS) maupun melalui e-mail Wajib Pajak terkait, untuk meminimalisir jika Surat Teguran tidak sampai ketangan Wajib Pajak.